

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



KECAMATAN
BEKASI
TIMUR



2025 LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Presented By:
KECAMATAN BEKASI TIMUR



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Bekasi Timur dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bekasi Timur selama Tahun 2025. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Bekasi Timur untuk mendukung Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kota Bekasi.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2025 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKIP ini. Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Bekasi, 28 Januari 2026
CAMAT BEKASI TIMUR,



ARIE HALIMATUSSADIYYAH, S.STP., M. Si
Pembina Tk.I
NIP. 19781118 199711 2 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 LATAR BELAKANG	7
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KEC. BEKASI TIMUR	11
1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	17
1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI	18
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 RENCANA STRATEGIS	25
2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN KEC. BEKASI TIMUR	26
2.1.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	28
2.2 PERJANJIAN KINERJA	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	40
3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	43
3.2.1 SASARAN STRATEGIS 1	43
3.2.1.1 INDIKATOR SASARAN 1	43
3.2.1.2 INDIKATOR SASARAN 2	53
3.2.1.3 INDIKATOR SASARAN 3	63
3.2.2 SASARAN STRATEGIS 2	75
3.2.2.1 INDIKATOR SASARAN 1	75
3.2 REALISASI ANGGARAN	81
3.3 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	86
BAB IV PENUTUP	91
1.1 KESIMPULAN	91
1.2 RENCANA TINDAK	92
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	6

DAFTAR TABEL

TABEL 1.2.1 DATA PENDIDIKAN PEGAWAI.....	15
TABEL 2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KEC. BEKASI TIMUR.....	27
TABEL 2.1.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA KEC. BEKASI TIMUR.....	30
TABEL 2.2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEC. BEKASI TIMUR.....	33
TABEL 2.2.2 ALOKASI ANGGARAN PER TRIWULAN.....	35
TABEL 3.1.1 CAPAIAN KINERJA KEC. BEKASI TIMUR TAHUN 2021	41
TABEL 3.2.1.1.1 DATA CAPAIAN KOMPONEN NILAI AKIP TH. 2021 DAN 2023	43
TABEL 3.2.1.1.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA NILAI AKIP KEC. BEKASI TIMUR.....	44
TABEL 3.2.1.1.3 PERBANDINGAN CAPAIAN IKU NILAI AKIP KEC. BEKASI TIMUR.....	45
TABEL 3.2.1.2.1 ANALISIS CAPAIAN IKU IKM.....	54
TABEL 3.2.1.2.2 PERBANDINGAN CAPAIAN IKU IKM KEC BEKASI TIMUR.....	55
TABEL 3.2.1.2.3 NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I.....	56
TABEL 3.2.1.2.4 NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER II.....	56
TABEL 3.2.1.2.5 NILAI INTERVAL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KEC. BEKASI TIMUR TH. 2023.....	56
TABEL 3.2.1.3.1 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	63
TABEL 3.2.1.3.2 PERBANDINGAN CAPAIAN IKU PERSENTASE PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	64
TABEL 3.2.2.1.1 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PENINGKATAN WILAYAH YANG TERTIB.....	76

TABEL 3.2.2.1.2 PERBANDINGAN CAPAIAN IKU PERSENTASE PENINGKATAN WILAYAH YANG TERTIB.....	76
TABEL 3.2.2.1.3 PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI IKU PERSENTASE PENINGKATAN WILAYAH YANG TERTIB.....	80
TABEL 3.3.1.1 REALISASI ANGGARAN DAN REALISASI FISIK KEGIATAN PER PROGRAM TA 2023.....	81
TABEL 3.3.1.2 ANGGARAN KEC. BEKASI TIMUR TAHUN 2023.....	86
TABEL 3.3.1.3 PAGU REALISASI YANG SUDAH DIUMUMKAN MELALUI SIRUP PER PROGRAM TAHUN 2023.....	86
TABEL 3.3.1.4 PAKET PEKERJAAN PADA KEC. BEKASI TIMUR.	87
TABEL 3.3.1.5 JENIS BELANJA PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN.....	87
TABEL 3.4.1 TABEL ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	85

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.2.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI.....	15
GAMBAR 3.3.1.1 TARGET DAN REALISASI KEUANGAN PER PROGRAM	80
GAMBAR 3.3.1.2 TARGET DAN REALISASI FISIK PER PROGRAM	81
GAMBAR 3.3.1.3 DIAGRAM JENIS BELANJA PADA KEC. BEKASI TIMUR TAHUN 2023.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tantangan tersendiri.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Penyusunan LKIP Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025 berdasarkan pada Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bekasi Timur, yang bertolak ukur dari Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Timur untuk satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Timur Tahun

2025-2029. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Timur berkaitan langsung dengan Visi Kota Bekasi yang terdapat dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 maupun Sasaran yang ada pada Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Timur yang pertama yaitu Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik. Indikator Kinerja Utama ini digunakan sebagai alat ukur untuk melihat Sasaran Renstra Kecamatan Bekasi Timur yaitu Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Timur. Penetapan Sasaran Strategis ini untuk menunjang Pencapaian Tujuan Ke-1 Kota Bekasi yang terdapat di dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari”.
2. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Timur yang kedua yaitu Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur. Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian Sasaran Renstra Kecamatan Bekasi Timur yaitu Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur. Penetapan Sasaran Strategis ini untuk ketercapaian Tujuan Ke-5 Kota Bekasi yang terdapat di dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas Disertai Tata Kelola Pemerintahan Modern dan Inovatif”.

Untuk Mewujudkan Tata Kota Bekasi yang Berestetika disertai Infrastruktur Modern dan Lestari di Kota Bekasi oleh karena itu Kinerja di Kecamatan Bekasi Timur harus meningkat salah satunya dengan meningkatkan peran LKM yang Mendukung Pelayanan Publik. Hal tersebut dapat diukur keberhasilannya menggunakan Perhitungan dari Persentase LKM yang Aktif dalam hal Mendukung Pelayanan Publik pada Tahun berjalan di Lingkungan Kecamatan

Bekasi Timur. Selain itu, untuk Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai Tata Kelola Pemerintahan Modern dan Inovatif, perlu ditingkatkan pula aspek Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di tiap Kecamatan dan Kelurahan dalam segala bentuk pelayanan kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Jika melihat pada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Timur pada Tahun 2024 dimana Indikator yang ada berjumlah 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dengan rincian Indikator yang berbeda dengan Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2025. Namun demikian, jika ditelaah pada Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, yaitu Nilai AKIP dengan Capaian Nilai malampaui target yang telah ditentukan yaitu dengan persentase capaian 105%, Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh capaian kinerja sebesar 103% dengan perolehan Nilai lebih tinggi yaitu 86.85 dari target 86, dan Indikator Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib pada tahun 2024 mampu mencapai 100% atau dapat memenuhi target yang ada. Namun dengan begitu, pada tahun 2025 Kecamatan Bekasi Timur harus bisa meningkatkan kinerja baik terhadap indikator kinerja yang telah ditentukan disebabkan adanya perubahan indikator yang ada sesuai dengan Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029. Adapun rincian kinerja yang harus difokuskan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2025, sehingga Indikator Kinerja yang ada lebih sedikit yaitu hanya terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi dan Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029. Sebab itu, fokus pertama yaitu terkait Indikator Kinerja **Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik**, Indikator ini berdasarkan Berdasarkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Target indikator tersebut pada Tahun 2025 yaitu sebesar

70%. Maka tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Timur memastikan seluruh LKM yang berada di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan berperan Aktif terutama dalam hal mendukung Pelayanan Publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat, guna tercapainya realisasi sebesar 100%.

2. Untuk Indikator Kinerja lainnya di Tahun 2025 yaitu **Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan**, Indikator ini dipilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM. Indikator Kinerja tersebut pada Tahun 2025 memiliki Target sebesar 0.21% dengan besaran baseline 0.18%. Maka tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Timur memastikan bahwa indeks kepuasan masyarakat di Tahun 2025 terhadap pelayanan di Kecamatan Bekasi Timur meningkat. Adapun upaya yang akan dilakukan di Tahun 2024 adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan *Front Office*, pembaruan ruang pelayanan dengan fasilitas yang lebih baik guna memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, dan pemutakhiran pemahaman atas aplikasi E-Open yang sudah berjalan, guna mempermudah pelayanan dari rumah, rehabilitasi loket pelayanan di Kantor Kecamatan dan Kelurahan.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Kecamatan Bekasi Timur. Untuk membahas lebih lanjut kinerja Kecamatan Bekasi Timur pada Tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III

(Akuntabilitas Kinerja) pada laporan kinerja Kecamatan Bekasi timur Tahun 2025 ini.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KECAMATAN BEKASI TIMUR

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Perangkat Daerah ini mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kecamatan dikategorikan sebagai *teritorial organization* serta memiliki kewewenangan dalam pemerintahan khususnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di Kota Bekasi. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika pembangunan di Kota Bekasi, baik yang berdimensi lokal, regional, dan nasional. Hal ini merupakan perwujudan cita-cita dari Visi Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera. Untuk mendukung semua itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi, aspek sosialisasi, aspek pemerintahan umum, dan aspek pembinaan aparatur.

Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Kecamatan tersebut, terlihat jelas pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi yang menempatkan Kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan dalam struktur Pemerintah Kota Bekasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Bekasi Timur memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Kewenangan yang dilimpahkan meliputi kewenangan yang bersifat internal, yakni kewenangan Camat untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintah secara utuh, termasuk didalamnya kewenangan yang menyangkut masalah-masalah kepegawaian, barang daerah dan juga pengelolaan keuangan (APBD) serta kewenangan yang bersifat eksternal, yakni kewenangan yang menyangkut pelaksanaan tugas pembinaan dan koordinasi kemasyarakatan secara utuh, antara lain tugas untuk mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, sekaligus dapat melakukan tindakan nyata sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat mengindikasikan adanya otoritas dan kapasitas Camat untuk sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing masing sekaligus strategi mengembangkannya;
2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah dilimpahkan;
3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya;
4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.

B. Gambaran Umum Kecamatan Bekasi Timur

Kecamatan Bekasi Timur merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang ada dari 12 Kecamatan di Kota Bekasi. Kecamatan Bekasi Timur sebagai pintu gerbang masuk ke Kota Bekasi dari bagian timur. Luas wilayah Kecamatan Bekasi Timur adalah 1.278.598 Ha, terdiri dari 4 Kelurahan yaitu:

- Kelurahan Bekasijaya dengan luas area : 350.000 Ha.
- Kelurahan Margahayu dengan luas area : 242.174 Ha.
- Kelurahan Durenjaya dengan luas area : 242.174 Ha.
- Kelurahan Arenjaya dengan luas area : 444.150 Ha.

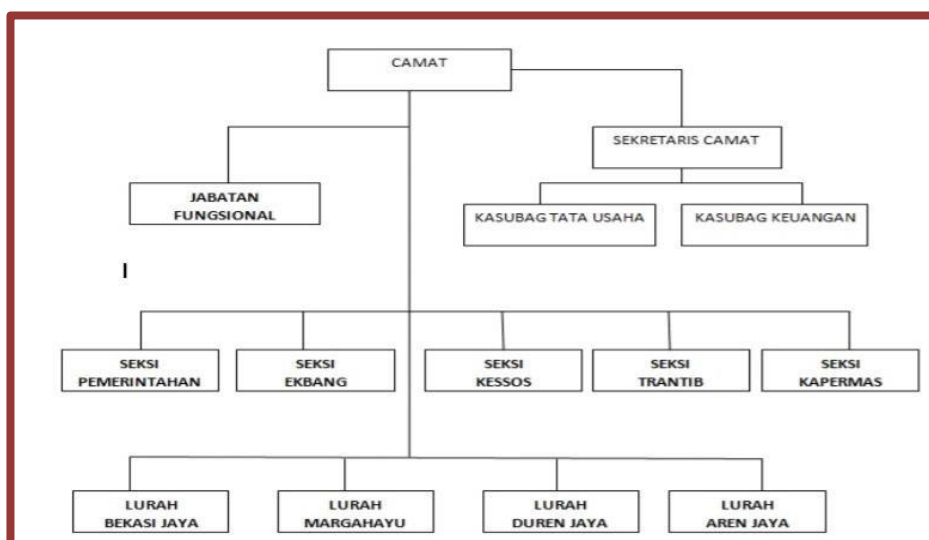
Secara administratif dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Rawa Lumbu
- Bagian Utara : Kecamatan Bekasi Utara
- Bagian Barat : Kecamatan Bekasi Selatan
- Bagian Timur : Kecamatan Tambun Selatan Kab. Bekasi

a) **Susunan organisasi Kecamatan Bekasi Timur terdiri atas:**

1. Camat, membawahkan:
2. Sekretaris Kecamatan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
4. Kasi Pemerintahan
5. Kasi Kesejahteraan Sosial
6. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
8. Lurah, membawahkan:
 - a. Sekretaris Kelurahan;
 - b. Kasi Permasbang;
 - c. Kasi Kesos;
 - d. Kasi Pemtrantib.
9. Kelompok Jabatan Fungsional
10. Bagan Struktur

Gambar 1.2.1
Bagan Struktur Organisasi
Kecamatan Bekasi Timur



Sumber: Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi yang didalamnya terbagi atas satu kesekretariatan, lima seksi, dua sub bagian, jabatan fungsional umum, ASN PNS, ASN PPPK Penuh Waktu dan ASN PPPK Paruh Waktu dengan jumlah personil menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut :

Tabel 1.2.1
Data Pendidikan Pegawai
Kecamatan Bekasi Timur

SDM	Jumlah Pegawai	Pendidikan Terakhir					
		S3	S2	S1	D3/D4	SMA	SMP
ASN PNS	49	-	13	26	-	9	1
ASN PPPK Penuh Waktu	114	-	-	43	10	61	-
ASN PPPK Paruh Waktu	40	-	-	7	1	32	-
Jumlah	203	-	13	76	11	102	1

Sumber: Bag. Kepegawaian Kec. Bekasi Timur Per Desember 2025

Fungsi dari masing-masing Seksi yang ada di Kecamatan Bekasi Timur yaitu:

- a. **Seksi Pemerintahan**, menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi pembinaan pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), memfasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan, memfasilitasi koordinasi pembinaan administrasi kependudukan di Kelurahan dan memfasilitasi penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan kependudukan;
- b. **Seksi Kesejahteraan Sosial**, menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi pembinaan kehidupan kerukunan beragama, serta program pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat, pelaksanaan

peningkatan peran serta masyarakat dalam program kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan perempuan, melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program pendidikan kepada Perangkat Daerah dan memfasilitasi pendirian sarana/program pendidikan ke pada Perangkat Daerah;

- c. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**, melaksanakan pengoordinasian inventarisasi potensi bidang Pemberdayaan Masyarakat, mengkoordinasikan dan pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan dan Kelurahan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, mengkoordinasikan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- d. **Seksi Ekonomi dan Pembangunan**, mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi, pendataan dan dokumentasi data bangunan Rumah Tinggal Tidak Bertingkat berkoordinasi dengan UPT terkait mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi dalam rangka pemeliharaan taman dan jalur hijau lingkungan kepada Perangkat Daerah terkait mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan pemantauan terhadap tumbuh kembangnya LKM atau Kelompok USP yang ada di masyarakat lingkup Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait, mengkoordinasikan identifikasi dan inventarisasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat kepada Perangkat Daerah terkait, membantu pelaksanaan pengawasan kelayakan UKM,

mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan titik jalan PJU dan memonitoring pemasangan lampu PJU di lingkungan kepada Perangkat Daerah terkait;

- e. **Seksi Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban**, melakukan koordinasi dalam rangka penegakan hukum dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan pembuangan limbah, memberikan penyuluhan dalam rangka pemeliharaan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, melakukan Koordinasi dengan tim penanggulangan bencana serta mengefektifkan pembuatan pos penanggulangan bencana dan pos keamanan lingkungan di setiap Kelurahan.

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani kegiatan urusan otonomi daerah juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu melaksanakan pelayanan masyarakat. Dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat, kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan harus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.

Berkaitan dengan pelayanan publik yang akan dihadapi Kecamatan Bekasi Timur tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan pembangunan Kota Bekasi. Secara umum, permasalahan yang dihadapi antara lain adalah adanya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, profesionalitas sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya dan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan yang baik.

1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

A. KEGIATAN KECAMATAN BEKASI TIMUR

Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bekasi Timur pada tahun 2025 terdiri dari:

I. Belanja Langsung Urusan (BLU)

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan

Publik terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dengan Sub Kegiatan Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan;
- b. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dengan Sub Kegiatan Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bekasijaya;
- c. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dengan Sub Kegiatan Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Margahayu;

- d. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dengan Sub Kegiatan Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Durenjaya;
- e. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dengan Sub Kegiatan Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Arenjaya;
- f. Kegiatan Pelaksanaan Urusam Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
 - b) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan);
 - c) Evaluasi Kelurahan;
 - d) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bekasijaya;
 - e) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Margahayu;
 - f) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Durenjaya;

- g) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arenjaya;
 - h) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bekasijaya;
 - i) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margahayu;
 - j) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Durenjaya;
 - k) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Arenjaya.
- b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan:
- a) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - b) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bekasijaya;
 - c) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Margahayu;
 - d) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Durenjaya;
 - e) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Arenjaya.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu: Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu: Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan sub

kegiatan: Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - b) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - b) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

- e) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Pengadaan Mebel;
 - b) Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. LAYANAN PRODUK KECAMATAN BEKASI TIMUR

Produk layanan yang terdapat di Kecamatan Bekasi Timur adalah sebagai berikut :

- a) Seksi Ekonomi dan Pembangunan terdapat layanan:
 1. Surat Rekomendasi Pendirian Tower BTS;
 2. Surat Pernyataan Kesanggupan (SPK).
- b) Seksi Pemerintahan terdapat layanan:

1. Surat Keterangan Waris;
 2. Surat Keterangan Peralihan Hak Tanah.
- c) Seksi Kesejahteraan Sosial terdapat layanan:
1. Surat Rekomendasi Nikah Non Muslim;
 2. Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Untuk Haji;
 3. Surat Keterangan Domisili Yayasan, Klinik, dan Sekolah;
 4. Surat Rekomendasi Yayasan, Klinik, dan Sekolah;
 5. Surat Keterangan Belum Menikah dan;
 6. Surat Keterangan Tidak Mampu.

Dalam mendukung pelayanan yang prima dan mempermudah birokrasi pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat Kecamatan Bekasi Timur memfasilitasi pelayanan kependudukan yang menjadi produk layanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seperti Pengantar Surat Pindah, Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA), Perekaman dan Pencetakan e-KTP, Pencetakan Kartu Keluarga (KK), Akta Kematian dan Akta Kelahiran.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2020 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sub bab ini menyajikan capaian organisasi secara umum.

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

D. Prestasi Organisasi

Menampilkan prestasi yang dicapai oleh kec Bekasi timur sebagai organisasi mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam kurun waktu 2025.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Bekasi Timur didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Camat Bekasi Timur Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, dengan target satuan berupa persentase (%), nilai, unit, dan jumlah, sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan. Renstra Kecamatan Bekasi Timur ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi. Penyusunan Renstra Kecamatan Bekasi Timur telah melalui tahapan-tahapan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Bekasi Timur merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Bekasi Timur dan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Bekasi Timur tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bekasi Timur yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Bekasi Timur dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bekasi Timur

A. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari Pernyataan Misi Kota Bekasi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Bekasi Timur memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan. Adapun tujuannya yaitu: **Terwujudnya Estetika Kota Disertai Infrastruktur Modern dan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Bekasi Timur**, Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.

B. Sasaran Kecamatan Bekasi Timur

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dicapai oleh Kecamatan Bekasi Timur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan mengacu kepada indikator kinerja dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 tersebut, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang menjadi sasaran strategis untuk mencapai tujuan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur periode 2025-2029. Kecamatan Bekasi Timur menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Timur

Sasaran tersebut akan diukur melalui Indikator Sasaran, yaitu Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik.

2. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur

Sasaran tersebut akan diukur melalui Indikator Sasaran, yaitu Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan.

Tabel 2.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Bekasi Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
Misi Ke-1 Kota Bekasi: Meningkatkan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Perkotaan yang Semakin Memuaskan dengan Didukung Ketersediaan Infrastruktur yang Memadai								
Misi Ke-5 Kota Bekasi: Mengembangkan Kolaborasi Strategis dan Dukungan Penguatan Manajemen Pemerintahan Kota yang Mendorong Kota Bekasi sebagai Kota Bertaraf Internasional yang Keren								
1.	Terwujudnya Estetika Kota		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	87.03	87.24	87.48	87.76	88.08

	Disertai Infrastruktur Modern dan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Bekasi Timur	Tujuan Ke-1 Kota Bekasi: Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika disertai Infrastruktur Modern dan Lestari						
		Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Timur	Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	70	72	74	77	81
		Tujuan Ke-5 Kota Bekasi: Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai Tata Kelola Pemerintahan Modern dan Inovatif						
		Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	0.21%	0.24%	0.28%	0.32%	0.36%

Sumber: RPJMD Kota Bekasi dan Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025 terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja utama Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas fungsi yang diampu. Untuk Kecamatan Bekasi Timur mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bekasi Timur
Tahun 2025 (Sesuai RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Target
				Alasan	Formulasi	
1.	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Timur	Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase	Berdasarkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Persentase LKM Aktif = $\frac{\text{Jumlah LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik}}{\text{Jumlah Total LKM}} \times 100\%$	70
2.	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persentase	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM.	$\frac{\text{Nilai IKM tahun } N - \text{Nilai IKM tahun } (N-1)}{\text{Nilai IKM tahun } (N-1)} \times 100 \%$	0.21%

Sumber: RPJMD Kota Bekasi dan Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut di atas merupakan IKU hasil dari turunan dan penyesuaian RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang digunakan terhitung sejak Agustus 2025. Dengan demikian, adanya penggunaan IKU

sebelumnya dari bulan Januari-Agustus yaitu penyesuaian Indikator dengan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, sebagaimana sebagai berikut:

Tabel 2.1.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bekasi Timur
Tahun 2025 (Sesuai RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Target
				Alasan	Formulasi	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bekasi Timur	Nilai	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP = Hasil Penilaian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP (Nilai Komponen Perencanaan Kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja)	74.50
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Nilai	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survey Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan	86.15

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Target
				Alasan	Formulasi	
2.	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Persentase	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan antara ketertiban, kebersihan dan keindahan.	Jumlah Zonasi yang telah Ditetapkan / Jumlah Zona Tertib X 100%	67%

Sumber: RPD Kota Bekasi dan Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2024-2026

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan. Berdasarkan pada Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kota, Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kota Bekasi, serta usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan. Berdasarkan atas hal tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Program pada Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi penunjang urusan pada Kecamatan Bekasi Timur yaitu:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program-program pada Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi merupakan Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja. Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok dan indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Berikut sasaran strategis Kecamatan Bekasi Timur, yaitu :

- a. **Sasaran Strategis Kesatu yaitu Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Timur** dalam sasaran strategis ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dicapai yaitu : **“Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik”**. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program yaitu **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**.
- b. **Sasaran Strategis Kedua yaitu Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur** dalam sasaran strategis ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dicapai yaitu **“Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan”**. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Kecamatan Bekasi Timur melaksanakan 4 (empat) program yaitu:
 1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik,**
 2. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,**
 3. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum,**

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Perjanjian Kinerja Camat Bekasi Timur selaku Kepala Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra yang telah ditetapkan. Indikator Perjanjian Kinerja adalah IKU Kecamatan Bekasi Timur dengan target yang disesuaikan dengan kondisi wilayah di Kecamatan Bekasi Timur. Berikut tabel Perjanjian Kinerja dan Alokasi Anggaran Kegiatan Camat Bekasi Timur Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Timur	Nilai	74	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	74
					Triwulan IV	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	86	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	86
2	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Persentase (%)	33%	Triwulan I	8%
					Triwulan II	8.5%
					Triwulan III	8.5%
					Triwulan IV	8%

Sumber: Bag. Kepegawaian/Perencanaan Kec. Bekasi Timur

Tabel Perjanjian Kinerja di atas merupakan Target Tahunan dan Triwulan dari IKU yang ada dalam Renstra Kec. Bekasi Timur Tahun 2024-2026 dan Turunan dari RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. IKU dan Target tersebut digunakan terhitung dari bulan Januari-Agustus 2025 sebelum adanya Perubahan RPJMD Kota Bekasi dan Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029.

Berikut di bawah ini adalah Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029 dan telah disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Perubahan IKU yang otomatis terjadi perubahan juga dalam Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut dimulai pada Agustus 2025.

Tabel 2.2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Timur	Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase	70	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	70
2	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persentase	0.21	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	0.21

Sumber: Bag. Kepegawaian/Perencanaan Kec. Bekasi Timur

Tabel 2.2.3
Alokasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan

No.	Program>Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan			
			I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 22.481.672.182,-				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 15.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 15.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 5.100.000,-	Rp. 2.950.000,-	Rp. 4.950.000,-
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 13.559.601.000,-	Rp. 3.390.128.100,-	Rp. 3.870.803.200,-	Rp. 2.907.996.950,-	Rp. 3.390.672.750,-
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	-	-	-
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Rp. 5.000.000,-	Rp. 1.249.975,-	Rp. 1.249.975,-	Rp. 1.249.975,-	Rp. 1.250.075,-
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 30.000.000,-	-	Rp. 18.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	-
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 120.000.000	-	-	Rp. 120.000.000,-	-

No.	Program>Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan			
			I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	-	-	-
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 390.000.000,-	Rp. 352.826.250,-	Rp. 12.391.250,-	Rp. 12.391.250,-	Rp. 12.391.250,-
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 130.000.000,-	Rp. 90.618.000,-	Rp. 30.960.900,-	-	Rp. 5100,-
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 35.000.000,-	Rp. 8.750.000,-	Rp. 8.750.000,-	Rp. 8.750.000,-	Rp. 8.750.000,-
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 30.000.000,-	-	Rp. 15.000.000,-	-	Rp. 15.000.000,-
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 150.000.000,-	Rp. 27.498.500,-	Rp. 47.498.500,-	Rp. 27.498.500,-	Rp. 47.504.500,-
14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 30.000.000,-	-	Rp. 30.000.000,-	-	-
15	Pengadaan Mebel	Rp. 100.000.000,-	-	Rp. 100.000.000,-		
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 100.000.000,-	-	Rp. 100.000.000,-		
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 500.000.000,-	Rp. 41.656.917,-	Rp. 41.656.917,-	Rp. 41.656.917,-	Rp. 125.087.747,-
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 8.550.363.200,-	Rp. 1.734.778.300,-	Rp. 2.057.028.300,-	Rp. 2.057.028.300,-	Rp. 2.701.528.300,-
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 13.748.000,-	Rp. 33.748.000,-	Rp. 13.748.000,-	Rp. 38.756.000,-

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

No.	Program>Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan			
			I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 200.000.000,-	Rp. 17.500.000,-	Rp. 60.000.000,-	Rp. 17.500.000,-	Rp. 105.000.000,-
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 100.000.000,-	Rp. 23.500.000,-	Rp. 26.300.000,-	Rp. 23.500.000,-	Rp. 26.700.000,-
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 200.000.000,-	-	-	Rp. 200.000.000,-	-
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 290.000.000,-				
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rp. 30.000.000,-	Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.500.000,-
2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kel. Bekasijaya	Rp. 40.000.000,-	Rp. 10.00.000,-	Rp. 10.00.000,-	Rp. 10.00.000,-	Rp. 10.00.000,-

No.	Program>Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan			
			I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kel. Margahayu	Rp. 40.000.000,-	Rp. 10.00.000,-	Rp. 10.00.000,-	Rp. 10.00.000,-	Rp. 10.00.000,-
4	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kel. Durenjaya	Rp. 40.000.000,-	Rp. 10.00.000,-	Rp. 10.00.000,-	Rp. 10.00.000,-	Rp. 10.00.000,-
5	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kel. Arenjaya	Rp. 40.000.000,-	Rp. 10.00.000,-	Rp. 10.00.000,-	Rp. 10.00.000,-	Rp. 10.00.000,-
6	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp. 100.00.000,-	Rp. 100.000.000,-	-	-	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 13.517.784.000,-				
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-	-	-	-

No.	Program>Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan			
			I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 716.907.200,-	Rp. 131.891.800,-	Rp. 155.434.000,-	Rp. 398.307.000,-	Rp. 31.274.400,-
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Bekasijaya	Rp. 2.324.545.600,-	Rp. 596.336.400,-	Rp. 596.336.400,-	Rp. 596.336.400,-	Rp. 596.336.400,-
4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Margahayu	Rp. 2.523.779.200,-	Rp. 651.444.800,-	Rp. 651.444.800,-	Rp. 651.444.800,-	Rp. 651.444.800,-
5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Durenjaya	Rp. 2.686.261.600,-	Rp. 669.565.400,-	Rp. 669.565.400,-	Rp. 669.565.400,-	Rp. 669.565.400,-
6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Arenjaya	Rp. 2.511.990.400,-	Rp. 640.397.600,-	Rp. 640.397.600,-	Rp. 640.397.600,-	Rp. 640.397.600,-
7	Evaluasi Kelurahan	Rp. 50.000.000,-	-	Rp. 50.000.000,-	-	-
8	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp. 100.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bekasijaya	Rp. 750.000.000,-	-	-	Rp. 750.000.000,-	-
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margahayu	Rp. 719.300.000,-	-	-	Rp. 719.300.000,-	-
11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Durenjaya	Rp. 200.000.000,-	-	-	Rp. 200.000.000,-	-
12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Arenjaya	Rp. 655.000.000,-	-	-	Rp. 655.000.000,-	-

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

No.	Program>Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan			
			I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kel. Bekasijaya	Rp. 40.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
14	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kel. Margahayu	Rp. 40.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
15	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kel. Durenjaya	Rp. 40.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
16	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kel. Arenjaya	Rp. 40.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 150.000.000,-				
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 150.000.000,-	Rp. 39.208.000,-	Rp. 67.327.000,-	Rp. 22.170.000,-	Rp. 21.295.000,-
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 100.000.000,-				
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-

Sumber: Bag. Keuangan Kec. Bekasi Timur

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah Perwujudan Kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui Laporan Pertanggungjawaban secara Periodik. Kecamatan Bekasi Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Bekasi Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program, kegiatan serta sub kegiatan.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Kec. Bekasi Timur Tahun 2025-2029 yang merupakan hasil Perubahan adanya Kepala Daerah baru atau turunan dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 pada bulan Agustus Tahun 2025, dimana sebelumnya berpedoman pada RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan Renstra Kec. Bekasi Timur Tahun 2024-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Bekasi.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Tahun Anggaran 2025 dalam dokumen Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029 untuk pengukuran kinerja telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dan terdapat 2 (dua) Indikator Sasaran yang diukur dari berbagai kegiatan di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi. Sasaran pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Timur adalah sasaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029, yang selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja utama dan realisasi capaiannya seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.1
Capaian Kinerja Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025
Sebelum Perubahan (Renstra Kec. Bekasi Timur Tahun 2024-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Renstra	Realisasi Capaian	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Timur	Nilai	74.50	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	86.15	-	-
2	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Persen (%)	67%	-	-

Sumber: Renstra Kec. Bekasi Timur Tahun 2024-2026

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025
Sesudah Perubahan (Renstra Kec. Bekasi Timur Tahun 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Renstra	Realisasi Capaian	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Timur	Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase	70	100	143
2	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persentase	0.21	0.33	157

Sumber: Renstra Kec. Bekasi Timur Tahun 2025-2029

Dari tabel 3.1.2 Capaian Kinerja Kecamatan Bekasi Timur, Untuk mencapai Sasaran Strategis yang pertama yaitu Meningkatkan LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Timur diukur dengan Indikator ***Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Timur*** merupakan Indikator baru hasil dari penyesuaian RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029 sehingga Capaian di Tahun 2024 tidak ada. Namun untuk Realisasi dan Capaian di Tahun Pertama atau Tahun 2025 adalah 100% dari Target 70% sehingga Capaian Kinerja yang diperoleh melebihi Target yang ada yaitu 143%. Hal ini dikarenakan Aktifnya LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) yang ada di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur berperan Aktif termasuk dalam segi Mendukung Pelayanan Publik yang ada di Wilayah Khususnya di Kelurahan masing-masing.

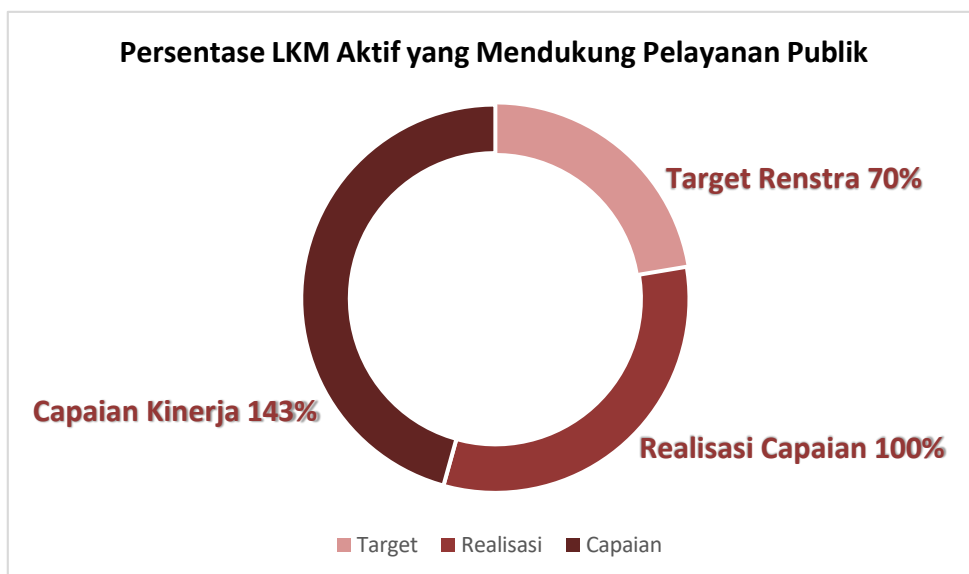
Untuk mencapai Sasaran Strategis yang kedua yaitu Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur diukur dengan Indikator ***Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan***, sama halnya dengan Indikator sebelumnya, Sasaran dan Indikator kedua ini merupakan Indikator baru hasil dari penyesuaian RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029 sehingga Capaian di Tahun 2024 tidak ada. Namun untuk Realisasi dan Capaian di Tahun Pertama atau Tahun 2025 adalah 0.33% dari Target 0.21% sehingga Capaian Kinerja yang diperoleh melebihi Target yang ada yaitu 157%. Meski dengan banyaknya bentuk permasalahan dan karakteristik Masyarakat yang ada di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur Menjadikan Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Wilayah dilakukan lebih Optimal dan terus dilakukan Evaluasi untuk Pelayanan yang lebih baik. Sehingga Masyarakat merasakan kemudahan dan terbantu atas apa yang menjadi masalah yang ada di wilayah serta masalah terkait dengan pengerusan Dokumen Kependudukan. Selain itu, Peran serta Aparatur Kelurahan dan Kecamatan yang siap dan sigap melayani Masyarakat. Dengan begitu, Realisasi Capaian yang didapat jauh melebihi Target Tahunan yang telah ditentukan, dan diharapkan agar Realisasi Capaian di Tahun Selanjutnya bisa lebih baik lagi.

3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Analisis Pencapaian Kinerja dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025 sesuai dengan Sasaran dan Indikator Kinerja yang berdasarkan dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Kecamatan Bekasi Timur secara rinci sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Timur

3.2.1.1 Diagram Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik



Sumber: Bag. Perencanaan Kec. Bekasi Timur

Berdasarkan Data tersebut diatas, Capaian Kinerja pada Indikator Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik melebihi target Target yang telah ditentukan, sehingga persentasenya di angka 143%, dikarenakan Realisasi Capaiannya 100% dari Target 70%. Angka Capaian Kinerja tersebut diperoleh dari hasil hitungan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik}}{\text{Jumlah Total LKM}} \times 100\%$$

$$\frac{323}{323} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Terkait Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran yang tersebut di atas berdasarkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Serta berdasarkan rumus perhitungan di atas, Realisasi Capaian yang diperoleh yaitu 100% didapat dari adanya total LKM di Kecamatan Bekasi Timur yaitu sebanyak 323 LKM dan semua LKM telah Aktif dalam Mendukung Pelayanan Publik. Pada Diagram 3.2.1.1 terkait Indikator Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik, Capaian Kinerja yang diperoleh lebih dari 100% yaitu 143% dikarenakan Realisasi Capaiannya 100% jauh melebihi Target yang ada yaitu 70%. Tidak dapat dilakukan Perbandingan dengan Capaian tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun sebelumnya belum diterapkan Indikator Kinerja ini, sedangkan Indikator Kinerja Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik baru digunakan di Tahun 2025 Penyesuaian RPJMD Kota Bekasi dan Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029. Namun diharapkan Capaian di tahun selanjutnya agar bisa dipertahankan atau menjadi lebih baik dan meningkat. Untuk melihat Target pada tahun selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1.2
Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama
LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik terhadap
Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2025-2029	TARGET RENSTRA TAHUN Ke -		REALISASI CAPAIAN TAHUN Ke -		RASIO CAPAIAN TAHUN Ke -	
			2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	76.5%	70%	72%	100%	-	143%	-

Sumber: Renstra Kec. Bekasi Timur Tahun 2025-2029 yang diolah

Indikator Kinerja Sasaran Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik merupakan indikator baru pada Kecamatan Bekasi Timur berdasarkan Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029, sehingga Indikator Kinerja Sasaran Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik dijadikan Indikator untuk meningkatkan Kinerja dan Layanan Publik pada Kecamatan Bekasi Timur. Faktor lain yang mendukung ketercapaian Target Indikator Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik pada sasaran Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Timur adalah ditunjangnya oleh kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 120.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 114.380.000 atau 95.4% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk kegiatan pra musrenbang dan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan di Bekasi Timur dengan target kinerja 18 Lembaga dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	120,000,000	114,380,000	95.4
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 Lembaga	18 Lembaga	100

2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 72.990.000 atau 72.9% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan event/promosi UMKM yang ada di lingkungan Kecamatan Bekasi Timur dengan target kinerja yaitu 12 laporan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	100,000,000	72,990,000	72.9
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100

3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 613.296.000 dan terealisasi sebesar Rp. 573.699.000 atau 93.54% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kader posyandu, pkk, pkp kecamatan, serta kegiatan HUT Kota Bekasi dan HUT RI, juga untuk kegiatan penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan dan kota, serta untuk penunjang kegiatan pemuka umat beragama, majelis umat beragama dan pemelihara rumah ibadah dengan target kinerja yang tertera pada tabel berikut dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	613,296,000	573,699,000	93.5
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas/Ormas	14 Pokmas/Ormas	100

Keluaran pada Sub Kegiatan ini mencakup berbagai kegiatan yang ada di beberapa Seksi di Kecamatan. Diantaranya Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Pemerintahan. Dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti, Kecamatan Bekasi Timur banyak meraih Juara atau Penghargaan atas keberhasilan kegiatan dan keikutsertaan dalam kegiatan tingkat Kota sehingga menunjang ketercapaian Indikator Keluaran Sub Kegiatan yang ada. Penghargaan yang didapat diantaranya:

No.	Penghargaan
1	Juara I Lomba Pawai Muharram Tk. Kota Bekasi
2	Juara I Lomba Paduan Suara Lagu Kerukunan Umat Beragama Tk. Kota Bekasi
3	Juara I Lomba Perempuan Inspiratif Tk. Kota Bekasi
4	Juara I Lomba Baris-Berbaris Kelurahan Tk. Kota Bekasi
5	Juara II Lomba Gerakan Peduli Sampah oleh PKK Kecamatan Tk. Kota Bekasi
6	Juara II Lomba Kader Berprestasi Tk. Kota Bekasi
7	Juara III Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Masyarakat Tk. Kota Bekasi
8	Juara Sekolah Ramah Anak Tingkat SMP Tk. Kota Bekasi
9	Juara III Taman Inspirasi Tk. Kota Bekasi
10	Juara Harapan II Lomba Kreasi 10 Program Pokok PKK Tk. Kota Bekasi

4. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bekasijaya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.050.969.600 dan terealisasi sebesar Rp. 4.043.509.200 atau 99.8% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rutin RT, RW, Kader posyandu, pkk, pkp serta MUB dan pemuka umat beragama yang ada di lingkungan Kelurahan Bekasijaya dengan target kinerja masing-masing kegiatan yang ada yaitu 12 Laporan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	4,050,969,600	4,043,509,200	99.8
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas/Ormas	7 Pokmas/Ormas	100

5. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Margahayu

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.364.780.200 dan terealisasi sebesar Rp. 5.335.337.100 atau 99.4% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rutin RT, RW, Kader posyandu, pkk, pkp serta MUB dan pemuka umat beragama yang ada di lingkungan Kelurahan Margahayu dengan target kinerja masing-masing kegiatan yang ada yaitu 12 Laporan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	5,364,780,200	5,335,337,100	99.4

Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas/Ormas	7 Pokmas/Ormas	100
----------	--	----------------	----------------	-----

6. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Durenjaya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.744.793.600 dan terealisasi sebesar Rp. 4.742.559.600 atau 99.9% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rutin RT, RW, Kader posyandu, pkk, pkp serta MUB dan pemuka umat beragama yang ada di lingkungan Kelurahan Durenjaya dengan target kinerja masing-masing kegiatan yang ada yaitu 12 Laporan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	4,744,793,600	4,742,559,600	99.9
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas/Ormas	7 Pokmas/Ormas	100

7. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arenjaya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.860.500.400 dan terealisasi sebesar Rp. 4.858.107.800 atau 99.9% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rutin RT, RW, Kader posyandu, pkk, pkp serta MUB dan pemuka umat beragama yang ada di lingkungan Kelurahan Arenjaya dengan target kinerja masing-masing kegiatan yang ada yaitu 12 Laporan dan telah

berhasil mencapai target dengan persentase 100%.
Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	4,860,500,400	4,858,107,800	99.9
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas/Ormas	7 Pokmas/Ormas	100

8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bekasijaya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 200.000.000 atau 100% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan taman yang ada di wilayah kelurahan dengan target kinerja yang ada yaitu 2 Unit dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	200,000,000	200,000,000	100
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100

9. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margahayu

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 200.000.000 atau 100% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan

pembangunan taman yang ada di wilayah kelurahan dengan target kinerja yang ada yaitu 1 Unit dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	200,000,000	200,000,000	100
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	100

10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Durenjaya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 200.000.000 atau 100% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan taman yang ada di wilayah kelurahan dengan target kinerja yang ada yaitu 1 Unit dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	200,000,000	200,000,000	100
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	100

11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Arenjaya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 200.000.000 atau 100% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan

pembangunan taman yang ada di wilayah kelurahan dengan target kinerja yang ada yaitu 1 Unit dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	200,000,000	200,000,000	100
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	100

12. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bekasijaya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 40.000.000 atau 100% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan LPM yang ada di Kelurahan Bekasijaya dengan target kinerja 2 lembaga kemasyarakatan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	40,000,000	40,000,000	100
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	100

13. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Margahayu

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 40.000.000 atau 100% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub

kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan LPM yang ada di Kelurahan Margahayu dengan target kinerja 2 lembaga kemasyarakatan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	40,000,000	40,000,000	100
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	100

14. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Durenjaya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 30.000.000 atau 75% dari target anggaran yang ada dikarenakan proses pemelihan pengurus baru sehingga anggaran satu triwulan tidak bisa dicairkan. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan LPM yang ada di Kelurahan Durenjaya dengan target kinerja 2 lembaga kemasyarakatan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100% walaupun dengan capaian realisasi target anggaran yang kurang optimal. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	40,000,000	30,000,000	75
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	100

15. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Arenjaya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 40.000.000 atau 100% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan LPM yang ada di Kelurahan Arenjaya dengan target kinerja 2 lembaga kemasyarakatan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100% walaupun dengan capaian realisasi target anggaran yang kurang optimal. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

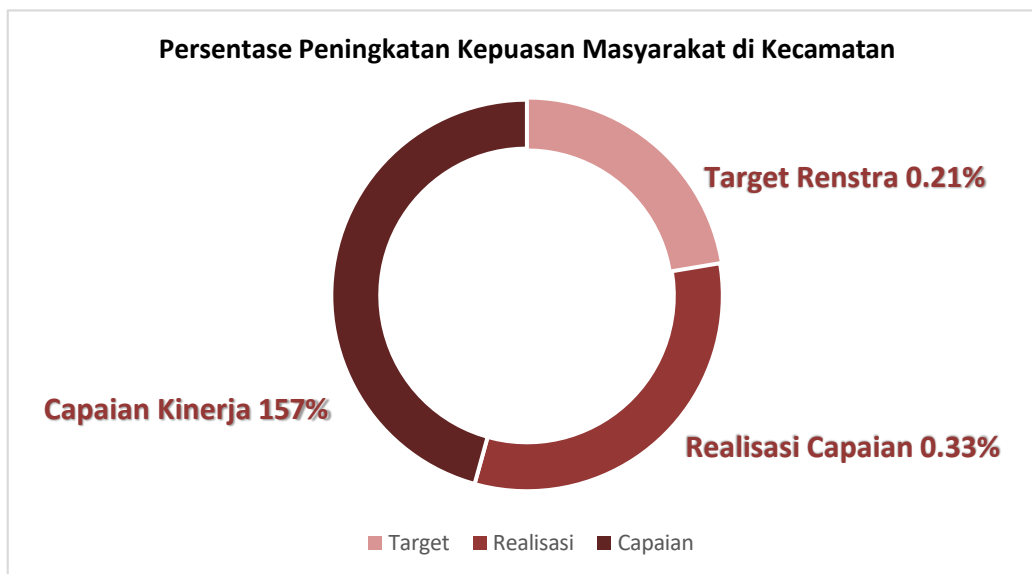
Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	40,000,000	40,000,000	100
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	100

Ada 15 (lima belas) sub kegiatan yang menunjang ketercapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan keseluruhan sub kegiatan mampu berhasil mencapai target kinerja yang ada. Persentase capaian keuangannya yaitu 95.72% sedangkan persentase capaian kinerja berhasil memenuhi target yaitu 100% atau yang berarti memuaskan.

3.2.2 Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur

3.2.2.1 Diagram Indikator Kinerja Sasaran Strategis2: Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

4



Sumber: Bag. Perencanaan Kec. Bekasi Timur

Berdasarkan Data tersebut diatas, Capaian Kinerja pada Indikator Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan melebihi target Target yang telah ditentukan, sehingga persentase capaiannya di angka 157%, dikarenakan Realisasi Capaiannya 0.33% dari Target 0.21%. Angka Capaian Kinerja tersebut diperoleh dari hasil hitungan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Nilai IKM Tahun N} - \text{Nilai IKM Tahun (N-1)}}{\text{Nilai IKM Tahun (N-1)}} \times 100\% \\
 & \frac{87.14 - 86.85}{86.85} \times 100\% = 0.33\%
 \end{aligned}$$

Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan yang diukur dengan nilai indeks kepuasan masyarakat tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran tersebut di atas Berdasarkan Berdasarkan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Pengukuran IKM diatur dalam PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan berdasarkan Surat Tugas Camat Bekasi Timur Nomor 800.1.11.1/058/Kc.BT.Ekb tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2025. Tidak bisa dilakukan Perbandingan dengan Capaian tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun sebelumnya belum diterapkan Indikator Kinerja ini, sedangkan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan baru digunakan di Tahun 2025 Penyesuaian RPJMD Kota Bekasi dan Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029. Namun diharapkan Capaian di tahun selanjutnya agar bisa dipertahankan atau menjadi lebih baik dan meningkat. Untuk

melihat Target pada tahun selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.2.2
Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan
terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2025-2029	TARGET RENSTRA TAHUN Ke -		REALISASI CAPAIAN TAHUN Ke -		RASIO CAPAIAN TAHUN Ke -	
			2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	0.30%	0.21%	0.24%	0.33%	-	157%	-

Sumber: Renstra Kec. Bekasi Timur Tahun 2025-2029 yang diolah

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur dilakukan dengan mengukur 7 (tujuh) jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Bekasi Timur yaitu di antaranya 1) Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); 2) Pelayanan Surat Domisili Haji; 3) Pelayanan Surat Keterangan Domisili Yayasan; 4) Pelayanan Surat Keterangan Waris; 5) Pelayanan Surat Keterangan Belum Nikah; 6) Pelayanan Surat Pengantar Izin Keramaian; 7) Pelayanan Surat Rekomendasi Nikah Non Muslim; 8) Surat Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah.

Adapun Keberhasilan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur yang nilainya melampaui target didukung oleh beberapa hal yaitu diantaranya:

- a. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang cukup memadai, dimana Ruang Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur yang cukup memadai dan kondusif sebagai tempat untuk menunggu antrian dirasakan masyarakat cukup

nyaman. Desain loket pelayanan juga menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan.

- b. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan berbasis aplikasi e-Open yang cukup memadai, dimana warga kota bekasi dapat mengajukan permohonan kependudukan dimana saja dan kapan saja. Dan adanya fitur halo petugas aplikasi ini diharapkan masyarakat Kota Bekasi Timur khususnya dapat melakukan permohonan dokumen kependudukan dengan menggunakan *smartphone* dari rumah tanpa harus datang ke Kantor Kecamatan Bekasi Timur. Tidak hanya itu, masyarakatpun tidak perlu datang ke Kantor Kecamatan Bekasi Timur. Berkas yang sudah selesai akan diantar kerumah oleh Satuan Petugas Pantauan dan Monitoring (SATGAS PAMOR).
- c. Terdapat sarana pengaduan dan permohonan informasi, dengan berkembangnya teknologi dan informasi saat ini dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi. Hal ini dimanfaatkan oleh Kecamatan Bekasi Timur dalam memberikan pelayanan. Saat ini Kecamatan Bekasi Timur memiliki beberapa kanal pengaduan maupun permohonan informasi secara online seperti *Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp, Website*. Selain itu, Kecamatan Bekasi Timur juga memiliki sarana loket pengaduan dan kotak saran pengaduan yang ditempatkan di depan ruang pelayanan. Kecamatan Bekasi Timur juga berintergrasi dengan pemerintah Kota Bekasi dalam penyebaran informasi dan pengaduan seperti *call center, POT* dan *Patriot Quick Response*.

- d. Implementasi Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN) yang menjadi program Kemendagri yang telah diterapkan di seluruh Indonesia memberi manfaat yang banyak di Kecamatan Bekasi Timur. Kini masyarakat tidak perlu bingung dalam mendapatkan pelayanan. Dengan datang ke loket pelayanan, warga masyarakat akan diarahkan ke seksi dimana masyarakat tersebut akan mengurus dokumen perijinan maupun non perijinan.
- e. Optimalisasi peran Satgas Pamor dalam melakukan pelayanan *door to door* ke masyarakat. Program pemerintah Kota Bekasi dalam memaksimalkan pelayanan jemput bola ke warga dengan memaksimalkan peran Satgas Pamor. Setiap RW di Kecamatan Bekasi Timur memiliki 1 (satu) orang satgas pamor yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada warga. Jika warga kesulitan baik jarak maupun waktu, Satgas Pamor dengan sigap membantu mengurus dokumen ke Kecamatan dan Kelurahan dengan tidak dipungut biaya (gratis).
- f. Adanya ragam Inovasi terkait pelayanan yang ada di Kecamatan Bekasi Timur, diantaranya Lamar Si Neng (Pelayanan Malam dan Pasar Rakyat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) serta Jebolan Timur (Jemput Bola Pelayanan Bekasi Timur) dua inovasi tersebut diperuntukan guna memudahkan dan mempercepat pelayanan warga yang ada di wilayah kecamatan bekasi timur.

Keberhasilan pencapaian Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur tersebut tidak terlepas dari adanya Program Pendukung yaitu: 1.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Serta aspek lain yang mendukung pencapaian Indikator adalah oleh sub kegiatan berikut:

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 26.312.000 dan terealisasi sebesar Rp. 25.934.040 atau 98.56% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pengadaan sarana penunjang ruang pelayanan dan pengadaan peralatan pendukung pelayanan dengan target kinerja 1 Laporan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	26,312,000	25,934,040	98.56
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	100

2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 97.849.000 atau 97.85% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan rapat koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan bekasi timur dengan target kinerja 12 dokumen, dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100% untuk capaian

target anggaran dan target fisik. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	100,000,000	97,849,000	97.85
Keluaran	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100

3. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 29.236.000 atau 97.45% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk kegiatan rutin K3 dengan target kinerja 12 laporan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	30,000,000	29,236,000	97.45
Keluaran	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	100

4. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bekasijaya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 38.783.770 atau 96.96% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan K3 di Kelurahan Bekasijaya dengan target kinerja 12 Laporan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	40,000,000	38,783,770	96.9
Keluaran	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	100

5. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Margahayu

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 37.094.635 atau 92.74% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan K3 di Kelurahan Margahayu dengan target kinerja 12 Laporan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	40,000,000	37,094,635	92.7

Keluaran	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	100
----------	--	------------	------------	-----

6. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Durenjaya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 38.735.000 atau 96.84% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan K3 di Kelurahan Durenjaya dengan target kinerja 12 Laporan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	40,000,000	38,735,000	96.8
Keluaran	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	100

7. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Arenjaya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 39.726.809 atau 99.32% dari

target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan K3 di Kelurahan Arenjaya dengan target kinerja 12 Laporan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	30,000,000	39,726,809	99.3
Keluaran	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	100

8. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 145.150.000 dan terealisasi sebesar Rp. 143.512.000 atau 98.87% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan dan penunjang kegiatan penertiban, sinergitas 3 pilar tingkat Kelurahan dan Kecamatan serta kegiatan penertiban dengan target kinerja 12 Laporan, dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100% untuk capaian target anggaran dan target fisik. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	145,150,000	143,512,000	98.87

Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100
----------	--	------------	------------	-----

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan didukung dengan langkah-langkah pelaksanaan guna keberlangsungan dan ketercapaian indikator yang ada, diantaranya Gerakan Kebersihan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan atau Grebek K3 di Lingkungan Kantor Kecamatan dan Kelurahan serta Lingkungan Wilayah Masyarakat yang perlu perhatian.

9. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 12.600.000 atau 84% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target kinerja 8 laporan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	15,000,000	12,600,000	84
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	100

10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 10.610.000 atau 70.73% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk menyusun dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dengan target kinerja 8 laporan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	15,000,000	10,610,000	70.73
Keluaran	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	100

11. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.911.644.000 dan terealisasi sebesar Rp. 14.328.932.469 atau 96.09% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan dan premi bpjs ASN di Kecamatan Bekasi Timur dengan target kinerja 852 dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	14.911.644.000	14.328.932.469	96.09

Keluaran	Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Premi BPJS ASN	852 Orang/Bulan	852 Orang/Bulan	100
----------	---	-----------------	-----------------	-----

12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.999.900 atau 100% dari target anggaran yang ada dan mampu memenuhi target capaian yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan dengan target kinerja 1 Laporan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	5,000,000	4,999,900	100
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100

13. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.999.000 atau 99.98% dari target anggaran yang ada dan mampu memenuhi target capaian yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan dengan target kinerja 12 Laporan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	5,000,000	4,999,000	99.9
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100

14. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 16.300.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.000.000 atau 92.02% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur asn di kecamatan dan kelurahan dan telah berhasil mencapai target atau persentase capaiannya 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	16,300,000	15,000,000	92.02
Keluaran	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	100

15. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 19.475.727 atau 97.4% dari target anggaran yang ada dan berhasil tercapai. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pembelian komponen listrik dan atau penerangan bangunan kantor kecamatan dan kelurahan dengan target kinerja 1 Paket dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	20,000,000	19,475,727	97.4
Keluaran	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket	1 Paket	100

16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 398.236.000 dan terealisasi sebesar Rp. 386.924.831 atau 97.2% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pembelian alat dan bahan pembersih, pembelian alat tulis kantor dan bahan komputer, serta pembelian makanan dan minuman pegawai kantor kecamatan dan kelurahan dengan target kinerja 1 Paket dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	398,236,000	386,924,831	97.2
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100

17. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 121.760.000 dan terealisasi sebesar Rp. 114.036.780 atau 93.66% dari target anggaran yang ada dan berhasil tercapai. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan di kecamatan dan kelurahan dengan target kinerja 1 Paket dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	121,760,000	114,036,780	93.6

Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
----------	--	---------	---------	-----

18. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 35.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 34.600.000 atau 98.86% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di kecamatan dan kelurahan dengan target kinerja 12 Dokumen dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	35,000,000	34,600,000	98.86
Keluaran	Jumlah Laporan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	100

19. Fasilitas Kunjungan Tamu

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 29.822.000 dan terealisasi sebesar Rp. 29.734.444 atau 99.7% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk penyediaan fasilitas kunjungan tamu yang ada di kecamatan dan kelurahan dengan target kinerja 12 Laporan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	29,822,000	29,734,444	99.7
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100

20. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 185.366.000 dan terealisasi sebesar Rp. 173.120.000 atau 93.4% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan target kinerja 12 laporan dan telah berhasil mencapai target 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	185,366,000	173,120,000	93.4
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100

21. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 22.560.000 dan terealisasi sebesar Rp. 21.075.000 atau 93.4% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk penyediaan fasilitas penatausahaan arsip dinamis di kecamatan dan kelurahan dengan target kinerja 18 Dokumen dan telah berhasil mencapai target dengan persentase

100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	22,560,000	21,075,000	93.4
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18 Dokumen	18 Dokumen	100

22. Pengadaan Mebel

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 86.724.000 dan terealisasi sebesar Rp. 83.261.100 atau 96.01% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pengadaan mebel guna penunjang kinerja dan pelayanan yang ada di kantor kecamatan dan kelurahan dengan target kinerja 20 Unit dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	86,724,000	83,261,100	96.01
Keluaran	Jumlah Mebel Kantor yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	100

23. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 508.683.000 dan terealisasi sebesar Rp. 394.360.313 atau 77.53% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pembayaran rekening telepon, internet, air dan listrik

di kantor kecamatan dan kelurahan dengan target kinerja 12 Laporan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	508,683,000	394,360,313	77.5
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100

24. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.520.866.982 dan terealisasi sebesar Rp. 5.211.178.566 atau 94.4% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk penggajian tenaga administrasi/teknis perkantoran dan penggajian tenaga kebersihan di kantor kecamatan dan kelurahan dengan target 12 Laporan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	5,520,866,982	5,211,178,566	94.4
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100

25. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 87.927.091 atau 87.93% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pembelian bensin, pemeliharaan rutin/*service* kendaraan dinas/ operasional atau kendaraan dinas jabatan di kecamatan dan kelurahan dengan target kinerja 2 unit dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	100,000,000	87,927,091	87.9
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	100

26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 184.710.200 dan terealisasi sebesar Rp. 115.651.861 atau 62.61% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pembelian bensin, pemeliharaan rutin/*service* kendaraan dinas/ operasional atau kendaraan dinas lapangan di kecamatan dan kelurahan dengan target kinerja 6 unit dan telah berhasil mencapai target

dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	184,710,200	115,651,861	62.6
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	100

27. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 99.600.000 atau 99.6% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan atau service perbaikan peralatan gedung kantor di kecamatan dan kelurahan dengan target kinerja 50 unit dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	100.000.000	99,600,000	99.6
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	100

28. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 197.503.000 atau 98.75% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk

pemeliharaan atau perbaikan gedung kantor di kecamatan dan kelurahan dengan target kinerja 2 unit dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	200,000,000	197,503,000	98.7
Keluaran	Luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100

Ada 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan yang menunjang ketercapaian 4 (empat) Program yaitu: yaitu: 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Persentase capaian keuangannya yaitu 93.26% sedangkan persentase capaian kinerja berhasil memenuhi target yaitu 100% atau yang berarti memuaskan namun capaian keduanya dianggap perlu ditingkatkan dan dipertahankan.

Namun tidak luput juga dengan pencapaian yang sudah 100%, dalam implementasi upayanya masih terdapat faktor penghambat, antara lain 1) Peran serta masyarakat yang masih kurang dalam melaksanakan giat bersih lingkungan. Saat ini, peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam mewujudkan wilayah K3 yang tertib, bersih, dan indah. Mengingat rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Untuk di Tahun 2023 target giat bersih lingkungan akan lebih digencarkan dan tentunya masih akan terus bersentuhan dengan masyarakat maka peran masyarakat harus didorong; 2) Sulitnya menilai suatu kriteria dikatakan baik atau tidak, dengan keterbatasan instrumen penilaian terhadap indikator ini sangat dirasakan. Kecamatan Bekasi Timur secara internal sudah dapat menilai secara mandiri untuk wilayah kantor. Namun, kedepannya akan sulit menilai mengingat untuk wilayah di luar lingkungan kantor memiliki tingkat kesulitan dan permasalahan yang lebih fluktuatif.

4.1 REALISASI ANGGARAN

Sebagai bentuk pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi melakukan realisasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatannya. Realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi selengkapya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3.1.1
Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik Kegiatan Per
Program Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI		
			NOMINAL	KEU %	FISIK %
1	KECAMATAN BEKASI TIMUR	23.697.386.382	22.504.347.382	94.97	100
1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	12.600.000	84%	100%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	10.610.000	70.73%	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.911.644.000	14.328.932.469	96.09%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.999.900	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	5.000.000	4.999.000	99.98%	100%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.300.000	15.000.000	92.02%	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.475.727	97.38%	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	398.236.000	386.924.831	97.16%	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	121.760.000	114.036.780	93.66%	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000	34.600.000	98.86%	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.822.000	29.734.444	99.71%	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.366.000	173.120.000	93.39%	100%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	22.560.000	21.075.000	93.42%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Mebel	86.724.000	83.261.100	96.01%	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	508.683.000	394.360.313	77.53%	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.520.866.982	5.211.178.566	94.39%	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	87.927.091	87.93%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.710.200	115.651.861	62.61%	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	99.600.000	99.6%	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

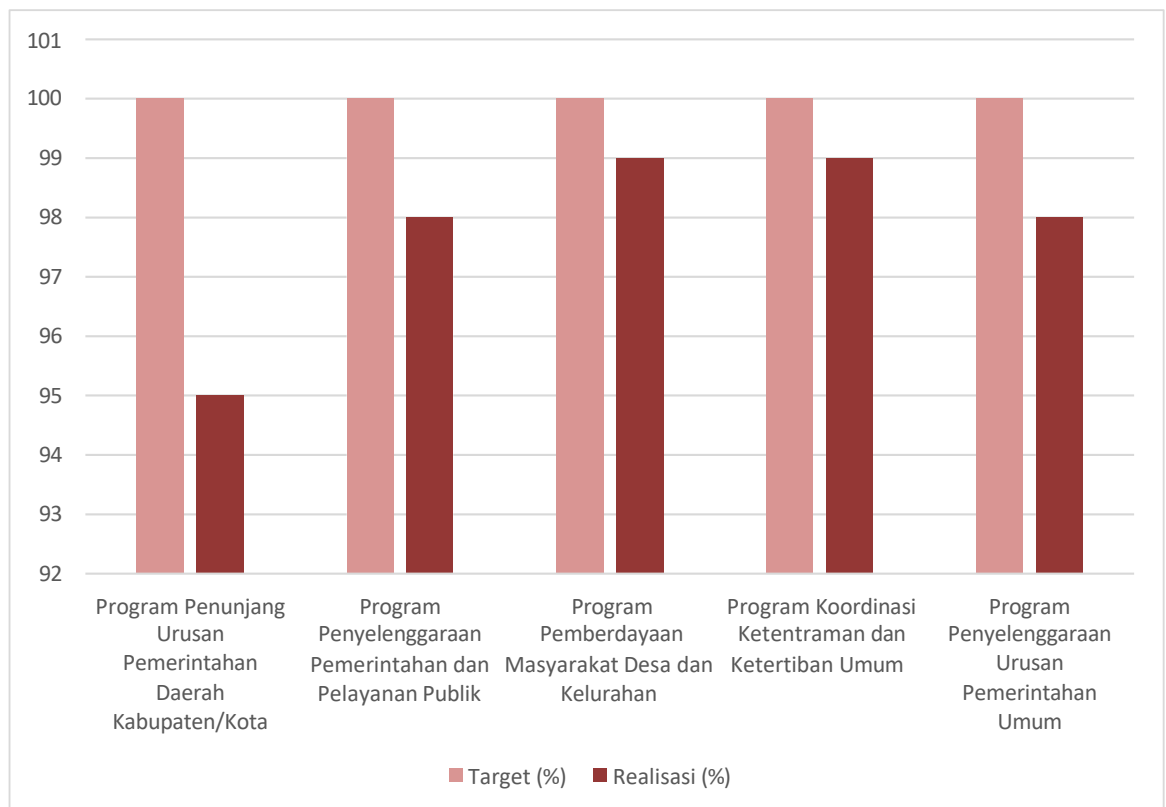
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	197.503.000	98.7%	100%
1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	30.000.000	29.236.010	97.45%	100%
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	26.312.000	25.934.040	98.56%	100%
1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.000.000	114.380.000	95.32%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	694.252.200	674.856.250	97.21%	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	100.000.000	72.990.000	72.99%	100%
1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	145.150.000	143.512.000	98.87%	100%
1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100.000.000	97.849.000	97.8%	100%
2	KELURAHAN BEKASIJAYA	4.330.969.600	4.322.292.970	99.8	100
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.000.000	38.783.770	96.96%	100%
2.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.050.969.600	4.043.509.200	99.86%	100%

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100%	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100%	100%
3	KELURAHAN MARGAHAYU	5.644.780.200	5.612.431.735	99.43	100
3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.000.000	37.094.635	92.74%	100%
3.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.364.780.200	5.335.337.100	99.4%	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100%	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100%	100%
4	KELURAHAN DURENJAYA	5.024.793.600	5.011.294.600	99.73	100
4.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.000.000	38.735.000	96.84%	100%
4.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.744.793.600	4.742.559.600	99.95%	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100%	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	30.000.000	75%	100%
5	KELURAHAN ARENJAYA	5.140.500.400	5.137.834.609	99.95	100
5.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.000.000	39.726.809	99.32%	100%
5.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.860.500.400	4.858.107.800	99.95%	100%	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100%	100%	
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100%	100%	
Total	43.838.430.182	42.588.201.296	97.15%	100%	

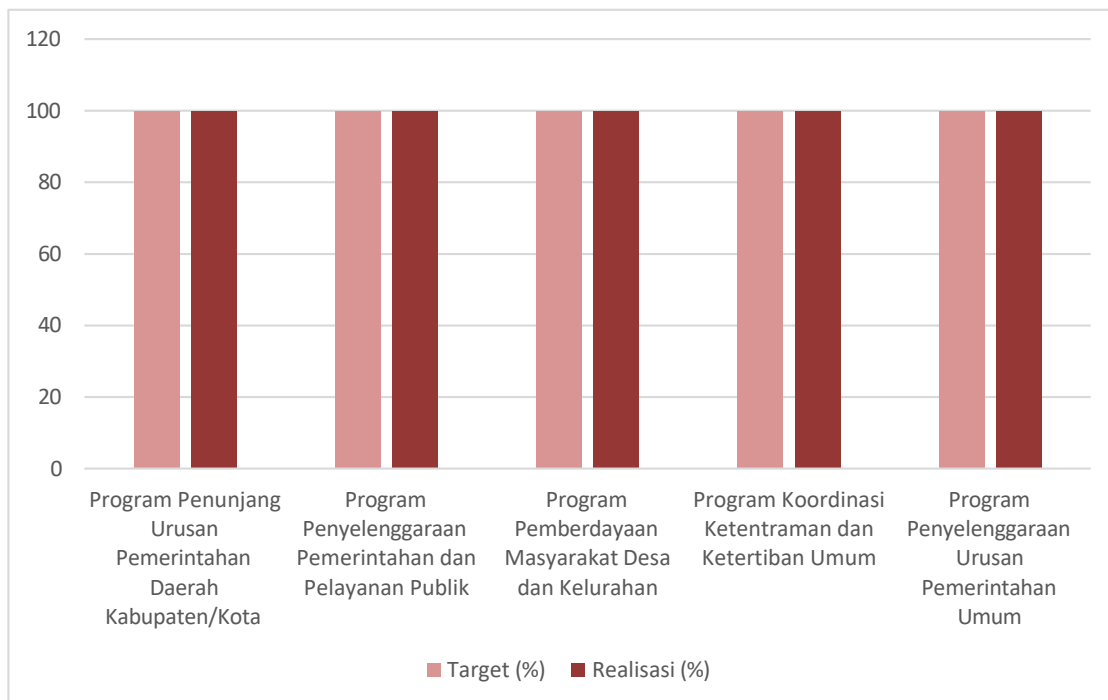
Sumber: simpelbang.bekasikota.go.id

Gambar 3.3.1.1
Target dan Realisasi Keuangan Per Program



Sumber: Bag. Keuangan Kec. Bekasi Timur yang diolah

Gambar 3.3.1.2
Target dan Realisasi Fisik Per Program



Sumber: Bag. Keuangan Kec. Bekasi Timur yang diolah

Realisasi Anggaran pada Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebesar Rp 42.588.201.296,- (empat puluh dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) atau sebesar 97.15% dan persentase ini naik dari persentase realisasi keuangan tahun sebelumnya, sedangkan realisasi fisiknya mencapai 100%.

Capaian Kinerja pada Kecamatan Bekasi Timur berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan serta pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Bekasi Timur Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai dengan *output* dan *outcome*. Dalam pelaksanaan program kerjanya, Kecamatan Bekasi Timur ditunjang dari sisi pendanaan pada tahun anggaran 2025 menggunakan dana Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dan Dana Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3.1.2
Anggaran Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025

Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 35.953.554.182,-
Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 7.084.876.000,-
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Rp. 800.000.000,-
Total Anggaran	Rp. 43.838.430.182,-

Sumber: Bag. Keuangan Kec. Bekasi Timur

Pada Tahun Anggaran 2025, total pagu yang dikelola oleh Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi sebesar Rp. 43.838.430.182,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan realisasi pengadaan barang/jasa sebesar Rp. 42.588.201.296,- (empat puluh dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah). Rincian perbandingan antara Pagu Anggaran dengan Pagu Realisasi Pengumuman adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.1.3
Pagu Realisasi yang sudah diumumkan melalui SIRUP per Program Tahun 2025

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.481.672.182	21.345.590.082	95
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	216.312.000	209.510.264	98
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.895.296.000	20.791.739.950	99

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	%
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	145.150.000	143.512.000	99
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.000.000	97.849.000	98
	TOTAL	43.838.430.182	42.588.201.296	98

Sumber: sirup.lkpp.go.id

Realisasi terbesar ada di (1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang di dalamnya termasuk banyak kegiatan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang menunjang keberhasilan tercapainya Indikator Sasaran Kec. Bekasi Timur. (2) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang didalamnya menunjang Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan di Wilayah Kec. Bekasi Timur. Sedangkan realisasi terkecil di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) di Kec. Bekasi Timur.

Selain itu, sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Kecamatan Bekasi Timur dan 4 (empat) Kelurahan pekerjaannya masuk dalam jenis pekerjaan Jasa Lainnya dan paket pekerjaan Swakelola sebanyak 8 paket serta Penyedia sebanyak 179 paket.

Tabel 3.3.1.4
Paket Pekerjaan Pada Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi

PAKET PEKERJAAN	JUMLAH PAKET	PAGU
SWAKELOLA	76	31.918.745.882
PENYEDIA	103	11.919.684.300
TOTAL	179	43.838.430.182

Sumber: sirup.lkpp.go.id

Selain itu, jenis belanja yang ada dalam paket pekerjaan di Kecamatan dan Kelurahan dapat dirincikan sebagai berikut :

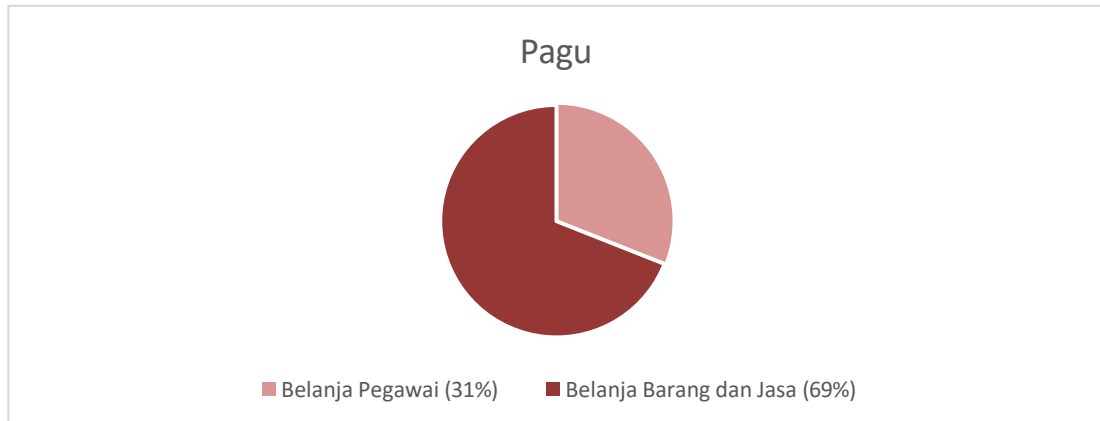
Tabel 3.3.1.5
Jenis Belanja Pada Kecamatan dan Kelurahan

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)
BELANJA PEGAWAI	14.826.804.000
BELANJA BARANG DAN JASA	29.011.626.182
TOTAL	43.838.430.182

Sumber: sirup.lkpp.go.id

Jenis belanja dengan pagu terkecil pada Belanja Pegawai sebab alokasi anggarannya hanya untuk sub kegiatan Penyediaan Gaji ASN yang ada di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu sebesar Rp. 14.826.804.000,- (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah) atau 33% dari total pagu anggaran keseluruhan yang ada. Sedangkan pagu terbesar ada di Belanja Barang dan Jasa sebab adanya anggaran kegiatan rutin kantor atau Belanja Langsung Penunjang Urusan serta anggaran makan dan minum rapat yang sebagian besar ada di kegiatan Belanja Langsung Urusan sebesar Rp. 29.011.626.182,- (dua puluh sembilan milyar sebelas juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau sebesar 67% dari keseluruhan pagu anggaran yang ada.

Gambar 3.3.1.3
Diagram Jenis Belanja Pada Kec. Bekasi Timur Tahun 2024



Sumber: Bag. Keuangan Kec. Bekasi Timur yang diolah

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel-tabel tersebut diatas diketahui bahwa telah sepenuhnya proses pelaksanaan pengadaan barang/ jasa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Namun masih adanya Aparatur Pengelola Kegiatan yang belum memahami proses pengadaan barang jasa secara elektronik dan belum memahami kegunaan dan manfaat yang didapatkan dengan menggunakan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

4.2 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNA SUMBER DAYA

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya untuk Tahun Anggaran 2025 pada tabel 3.4.1 berikut:

Tabel 3.4.1
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Timur	Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	100%	95%	0.95%
2	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100%	98.5%	0.98%

Sumber: Renstra Kec. Bekasi Timur Tahun 2025-2029 yang diolah

Keterangan:

Capaian Kinerja = realisasi indikator/target x 100%

Penyerapan Anggaran = realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung indikator

Tingkat Efisiensi = penyerapan anggaran/target x 100%

Berdasarkan tabel 3.4.1 di atas, Kecamatan Bekasi Timur sepanjang Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan program dan kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari kolom capaian kinerja dengan angka persentase 100%. Namun tetap ditemukan adanya angka persentase atas efisiensi pada dua indikator kinerja sasaran. Selain itu, pada Indikator Kinerja Sasaran Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik angka efisiensi terkecil yaitu 0.95% dengan artian capaian kinerja dan penyerapan anggaran program atau kegiatan berhasil terlaksana.

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2025.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Bekasi Timur atas penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2025 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Bekasi Timur telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun

2025 ini Kecamatan Bekasi Timur memiliki 2 (dua) sasaran strategis serta 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini Renstra), maka terlihat bahwa pada tahun 2025 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai, bahkan ada beberapa yang melebihi target. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025-2029 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 terpenuhi sesuai dengan harapan.

1.2 Rencana Tindak

Berdasarkan capaian kinerja Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2025, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya mengingat Tahun 2025 adalah tahun pertama periode Renstra Tahun 2025-2029. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. LKIP Kecamatan Bekasi Timur merupakan hasil pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai, oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di Kecamatan Timur agar terjalin komunikasi yang baik;
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terutama dalam penyusunan Program yang ada di Kecamatan Bekasi Timur agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/ perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan

kewenangan yang telah dilimpahkan dari Wali Kota kepada Camat;

3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur, di samping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota Bekasi melalui RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang. Untuk program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Timur pada Tahun 2025 menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan dimasa yang akan datang sehingga tidak mempengaruhi terhadap capaian kinerja Kecamatan Bekasi Timur secara keseluruhan dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk

program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah sesuai target/kategori baik selama Tahun 2025 agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh aparatur di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan dalam tugas dan pengabdian kita. Aamiin.